



**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
2025-2029
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BOGOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman resmi dalam memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional melalui RPJMN dengan kebijakan pembangunan daerah melalui RPJMD.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, hingga indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan kondisi aktual ketenagakerjaan, dinamika pembangunan daerah, serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada periode 2025–2029. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkeadilan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini, baik berupa data, masukan, maupun pemikiran konstruktif. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Bogor, 17 September 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bogor



Drs. Nana Mulyana, M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197205031992031007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	II-3
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	II-4
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-33
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II-35
2.2.1 Permasalahan	II-35
2.2.2 Isu Strategis	II-38
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI	III-1
3.1 Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029	III-3
3.3 Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029	III-5
3.4 Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029	III-6
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025–2029	IV-1
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja	IV-39
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel a Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II-3
Tabel b Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-3
Tabel c Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II-3
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	II-10
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	II-14
Tabel 2.3 Perumusan Permasalahan Dinas Tenaga Kerja.....	II-25
Tabel 2.4 Perumusan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja	II-32
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja.....	III-5
Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Berdasarkan Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja	III-5
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	IV-6
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030	IV-23
Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020-2029	IV-34
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja	IV-35
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja	IV-36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan Renstra PD	I-3
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor	II-2



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem ...

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

Bagian Kedua

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.
- (3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V ...

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BOGOR,


RUDY SUSMANTO



Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,




AJAT ROCHMAT JAINIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BOGOR

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan:

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- (10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tenaga Kerja menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2025 serta Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2024-2029, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Kelas A Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, yaitu menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
- 2) Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja mengikuti ketentuan sistematika dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025- 2029

3.4. Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Disnaker Tahun 2025-2029

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disnaker

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang; Sekretariat terdiri 2 (dua) Sub Bagian, dan untuk Bidang terdiri dari Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja (1 seksi), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dan Sub Koordinator yang bekerja dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan Kepala Bidang.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Organisasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

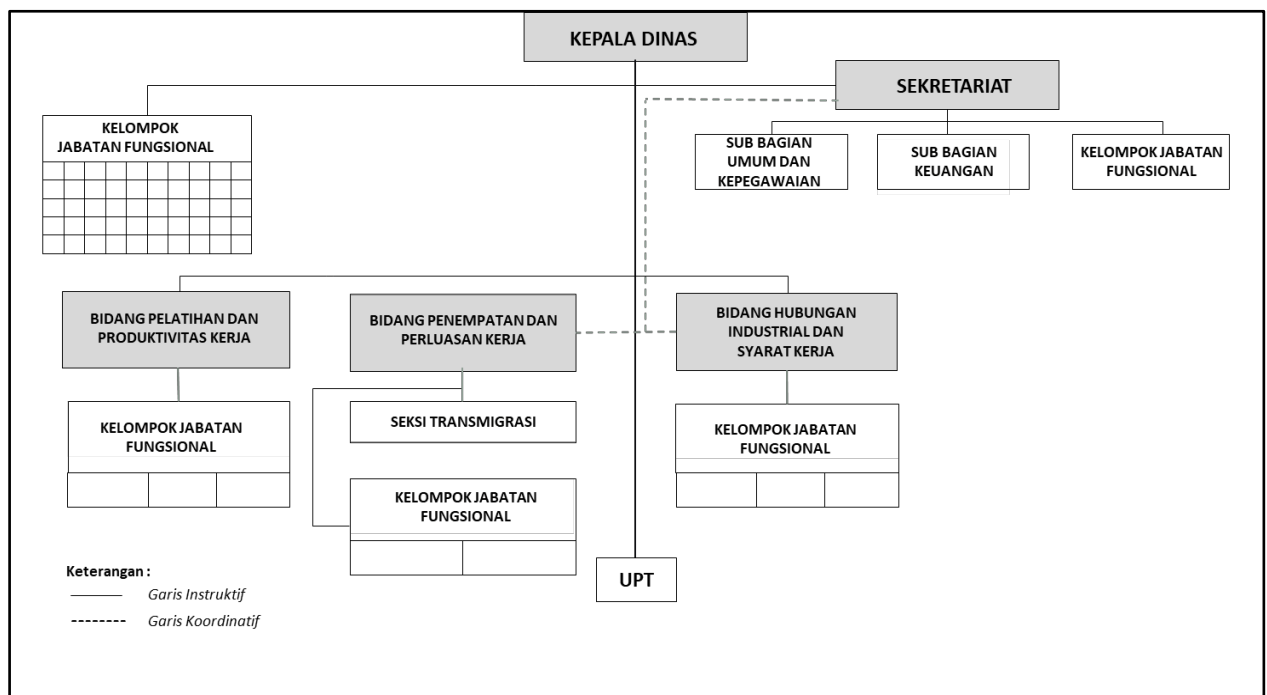
C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional ; Sub Koordinator Program dan Pelaporan
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan :
 - a. Seksi Transmigrasi; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPT; dan
7. Kelompok jabatan fungsional.

Secara lengkap susunan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan bupati Nomor 4 tahun 2022 disajikan dalam Gambar.2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.



2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan program dan kegiatan didukung oleh 103 orang staf (data per 1 Mei 2025) yang terdiri dari :

- 1) PNS : 46 orang
- 2) CPNS : 5 orang
- 3) PPPK : 4 orang
- 4) Tenaga Rekrutmen : 19 orang
- 5) Tenaga Keamanan : 15 orang
- 6) Tenaga Kebersihan : 14 orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini :

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan	PNS	CPNS	PPPK	Tenaga Rekrutmen	Tenaga Keamanan	Tenaga Kebersihan	Jumlah	%
ASN	-	-	-	-	-	-	55	53,40
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	4	1	3	-	-	-	8	7,77
III	34	4	1	-	-	-	39	37,86
IV	8	-	-	-	-	-	8	7,77
Non-ASN	-	-	-	19	15	14	48	46,60
TOTAL	46	-	-	19	15	14	103	100

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	PPPK	Tenaga Rekrutmen	Tenaga Keamanan	Tenaga Kebersihan	Jumlah	%
Laki-Laki	26	2	4	10	15	12	69	67
Perempuan	20	3	-	9	-	2	34	33
TOTAL	46	5	4	19	15	14	103	100

Tabel c - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	PPPK	Tenaga Rekrutmen	Tenaga Keamanan	Tenaga Kebersihan	Jumlah	%
S2	14						14	13,59
S1	26	4	1	13	3		47	45,63
D3	2	1		2			5	4,85
SMA/SMK	4		3	4	7	8	26	25,24
SMP					5	5	10	9,71
SD						1	1	0,97
TOTAL	46	5	4	19	15	14	103	100

Sedangkan penugasan ke sub-unit sebagai berikut:

- 1) Sekretariat : 36 orang
- 2) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja ... : 8 orang
- 3) Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja : 15 orang
- 4) Bidang Industrial dan Syarat Kerja : 17 orang
- 5) UPT Balai Latihan Kerja : 25 orang
- 6) Transito : 2 orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

- 1) Esselon II B (Kepala Dinas) : 1 orang
- 2) Esselon III A (Sekretaris) : 1 orang
- 3) Esselon III B (Kepala Bidang) : 3 orang
- 4) Esselon IV A (Kasubag/Kasie/Sub Koordinator) .. : 12 orang
- 5) Esselon IV B (Kasubag TU) : 1 orang
- 6) Pejabat Fungsional :
 - a) Arsiparis : 1 orang
 - b) Pengantar Kerja : 2 orang
 - c) Instruktur : 5 orang
 - d) Mediator : 7 orang
- 7) Pelaksana :
 - a) Administrasi ASN : 18 orang
 - b) Administrasi Non ASN : 28 orang
 - c) Keamanan : 10 orang
 - d) Kebersihan : 14 orang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) untuk urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

a Indikator Kinerja Utama

- 1 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten menunjukkan hasil yang melampaui target. Target

kinerja yang telah ditetapkan sebesar 22,96%, dengan realisasi capaian sebesar 29,35%, sehingga rasio capaian mencapai 127,83%. Capaian yang melampaui target ini mencerminkan bahwa Dinas Tenaga Kerja berhasil melaksanakan program penempatan tenaga kerja secara efektif dan optimal. Kinerja ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas layanan antar kerja, penguatan jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta peningkatan akses informasi pasar kerja bagi pencari kerja. Keberhasilan tersebut menjadi indikasi positif atas kontribusi Dinas Tenaga Kerja dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja di wilayah kabupaten.

- 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada periode pelaksanaan menunjukkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja ditetapkan sebesar 1,05%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 1,05%, sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi telah berjalan sesuai rencana dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan ini menunjukkan kinerja yang efektif dari Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
- 3 Kebijakan Transmigrasi Pemerintah Pusat yang Ditindaklanjuti menunjukkan hasil yang mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Target kinerja sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga rasio capaian mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan tindak lanjut terhadap seluruh kebijakan transmigrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan komitmen dan konsistensi kinerja perangkat daerah dalam mendukung program transmigrasi nasional serta memastikan sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah.

b Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tercapai dan Terlampaui

1. Indikator Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menunjukkan hasil yang mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Target kinerja sebesar 100%, dengan realisasi capaian sebesar 100%, sehingga rasio capaian mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh kebutuhan fasilitasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja telah terpenuhi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya telah berjalan sesuai perencanaan, sehingga memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Indikator Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja menunjukkan hasil yang melampaui target secara signifikan. Target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 12,45%, dengan realisasi capaian sebesar 76,92%, sehingga rasio capaian mencapai 617,8%. Capaian yang jauh melampaui target ini mencerminkan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah berhasil meningkatkan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dan dokumen rencana tenaga kerja secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dalam mengintegrasikan perencanaan strategis ke dalam pelaksanaan program, serta efektivitas pengendalian dan koordinasi internal dalam memastikan setiap kegiatan mendukung pencapaian sasaran pembangunan ketenagakerjaan.
3. Indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan hasil yang melampaui target. Target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 66,08%, dengan realisasi capaian sebesar 67,05%, sehingga rasio capaian mencapai 101,47%. Capaian yang melampaui target ini mencerminkan bahwa Dinas Tenaga Kerja berhasil mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja yang tepat sasaran. Keberhasilan ini menunjukkan

adanya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4. Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Bekerja menunjukkan hasil yang melampaui target. Target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 22,96%, dengan realisasi capaian sebesar 29,34%, sehingga rasio capaian mencapai 127,82%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja berhasil meningkatkan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja terdaftar. Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan dalam memperluas akses informasi pasar kerja, memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri, serta meningkatkan kualitas pelayanan antar kerja. Hal ini sekaligus menunjukkan kontribusi nyata Dinas Tenaga Kerja dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan serapan tenaga kerja di wilayah kabupaten.
5. Indikator Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) menunjukkan hasil yang melampaui target. Target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 26,56%, dengan realisasi capaian sebesar 42,65%, sehingga rasio capaian mencapai 160,58%. Capaian yang melampaui target ini mencerminkan bahwa Dinas Tenaga Kerja berhasil meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan tata kelola kerja yang layak. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas upaya pembinaan, pengawasan, serta sosialisasi regulasi ketenagakerjaan yang dilakukan kepada perusahaan. Keberhasilan tersebut turut berkontribusi dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta memperkuat iklim ketenagakerjaan yang kondusif di wilayah kabupaten/kota.
6. Indikator Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan menunjukkan hasil yang mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Target kinerja sebesar 100%, dengan realisasi

capaian sebesar 100%, sehingga rasio capaian mencapai 100%.Capaian ini mencerminkan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan fasilitasi terhadap seluruh peserta transmigrasi yang ditempatkan secara optimal sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mendukung program transmigrasi pemerintah, serta memastikan bahwa peserta transmigrasi mendapatkan layanan penempatan yang layak, terarah, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tidak tercapai

- 1 Indikator Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi yang Ditempatkan menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 97,83%, dengan realisasi capaian sebesar 84,08%, sehingga rasio capaian mencapai 93,71%. Capaian yang belum mencapai target ini menunjukkan bahwa meskipun program pelatihan dan sertifikasi kompetensi telah terlaksana dengan baik, penempatan lulusan masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa faktor penyebab antara lain: keterbatasan ketersediaan lowongan kerja yang sesuai dengan bidang kompetensi lulusan, ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi yang dimiliki, serta tingginya persaingan di pasar kerja.

Meskipun demikian, capaian ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Kedepan Dinas Tenaga Kerja perlu memperkuat jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan industri, meningkatkan layanan bursa kerja, serta menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan aktual pasar kerja agar tingkat penempatan lulusan bersertifikat kompetensi dapat lebih optimal.

Pada bagian ini akan dipaparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kedua indikator tersebut menjadi acuan dalam menilai sejauh mana program, kegiatan, dan layanan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Penyajian capaian ini penting untuk memberikan gambaran obyektif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, sekaligus menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, uraian pencapaian kinerja ini akan menampilkan perkembangan dari tahun 2020 hingga 2024 secara berkesinambungan. Data yang disajikan meliputi realisasi capaian setiap indikator serta rasio keberhasilannya terhadap target tahunan yang ditetapkan. Informasi tersebut disusun dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2020–2024.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

Urusan/Unsur : Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : Tenaga Kerja

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	IKU																	
	TUJUAN : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi penyediaan lapangan kerja (Renstra 2018-2023)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,40	0,41	0,43	0,45	-	1,00	1,03	0,99	0,46	-	250	251,22	230,23	102,22	-
	SASARAN 1 : Jumlah lapangan kerja yang terisi (Renstra 2018-2023)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	12,38	20,73	20,85	21,98	-	11,66	16,69	26,13	23,86	-	94,18	80,51	125,32	108,55	-
	SASARAN 2 : Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti (Renstra 2018-2023)	Presentase Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	TUJUAN: Terwujudnya pemenuhan lapangan kerja (Renstra 2024-2026)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	22,96	-	-	-	-	29,35	-	-	-	-	127,83
	SASARAN 1 : Meningkatkan tenaga kerja berdaya saing (Renstra 2024-2026)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	-	-	-	1,05	-	-	-	-	1,05	-	-	-	-	100
	SASARAN 2 : Meningkatkan jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat (Renstra 2024-2026)	Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
IKK																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	4,90	5,10	5,30	12,5	-	11,93	10,45	5,35	76,92	-	243,43	204,99	100,88	617,86

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	%	93,8	95,63	96,15	97,00	97,8	86,3	41,15	86,04	98,07	84,08	99,75	72,40	94,37	101,44	93,71
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	67,6	64,11	65,36	65,88	66,1	72,6	65,25	64,87	67,05	67,05	107,50	101,77	99,25	101,77	101,47
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	%	12,4	20,73	20,85	21,98	23	37,3	17	26,13	23,86	29,35	301,45	80,53	125,34	108,54	127,82
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	-	8,31	9,14	10,05	26,6	-	8,58	15,04	14,25	42,65	-	103,32	164,52	141,79	160,58
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Melalui data anggaran, target, serta realisasi belanja daerah yang dialokasikan setiap tahunnya, dapat terlihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, rasio antara realisasi dengan anggaran juga memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan terhadap perencanaan anggaran serta kemampuan Dinas dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan yang tersedia.

Secara lebih rinci, perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada periode tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel tersebut menyajikan perbandingan antara jumlah belanja daerah, target yang ditetapkan, realisasi yang dicapai, serta rasio realisasi terhadap anggaran pada masing-masing tahun. Dengan adanya penyajian data tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tren pengelolaan pendanaan, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan strategi pembiayaan di masa yang akan datang.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.924.267.000	12.010.501.968	14.007.631.000	13.322.059.397	41.610.970.922	3.749.630.424	11.750.482.155	13.409.379.359	12.948.261.072	39.822.101.888	95,55	97,84	95,73	97,19	95,70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.651.000	322.791.868	318.073.476	447.281.952	347.772.668	265.088.400	319.436.911	311.949.887	437.612.499	345.299.968	97,58	98,96	98,07	97,84	99,29
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.838.000	93.169.750	56.428.585	20.906.221	16.738.000	21.637.800	91.719.750	52.497.525	20.897.221	16.738.000	94,74	98,44	93,03	99,96	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	6.047.100	13.076.055	12.873.600	12.581.000	-	6.047.100	13.047.050	12.842.300	12.581.000	-	100,00	99,78	99,76	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	7.247.100	11.276.055	11.073.600	11.713.500	-	7.247.100	11.110.000	11.046.900	10.916.000	-	100,00	98,53	99,76	93,19
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	83.404.000	31.831.200	22.673.900	28.057.300	44.568.700	81.695.200	31.121.200	22.454.500	25.418.450	43.457.000	97,95	97,77	99,03	90,59	97,51
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	9.586.650	14.392.110	15.207.900	16.341.000	-	9.586.650	14.313.900	15.137.400	16.015.000	-	100,00	99,46	99,54	98,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.521.000	10.620.850	12.429.990	10.378.450	11.658.300	18.520.700	10.620.850	12.264.900	10.173.150	11.658.300	100	100,00	98,67	98,02	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.888.000	164.289.218	187.796.781	348.784.881	234.172.168	93.234.700	163.094.261	186.262.012	342.097.078	233.934.668	96,23	99,27	99,18	98,08	99,90
Pubikasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.982.362.796	9.208.769.722	10.006.697.294	9.421.544.742	10.136.465.241	3.925.188.894	9.097.207.777	9.563.792.962	9.260.947.946	9.982.815.605	98,56	98,79	95,57	98,30	98,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.857.873.796	9.101.844.986	9.883.905.558	9.285.609.017	10.004.149.448	3.806.485.494	8.990.760.534	9.443.049.241	9.128.884.812	9.850.728.097	98,67	98,78	95,54	98,31	98,47
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.513.000	97.723.636	108.530.671	118.594.823	113.444.568	105.978.100	97.321.143	107.224.571	115.487.909	113.444.508	95,04	99,59	98,80	97,38	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.976.000	3.084.800	7.539.995	9.080.176	9.933.225	12.725.300	3.084.800	7.145.450	8.538.100	9.705.000	98,07	100,00	94,77	94,03	97,70
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	6.116.300	6.721.070	8.260.726	8.938.000	-	6.041.300	6.373.700	8.037.125	8.938.000	-	98,77	94,83	97,29	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	6.668.350	6.057.800	5.988.860	6.726.000	-	5.318.350	4.650.000	3.821.200	6.717.000	-	79,76	76,76	63,81	99,87
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	6.668.350	6.057.800	5.988.860	6.726.000	-	5.318.350	4.650.000	3.821.200	6.717.000	-	79,76	76,76	63,81	99,87
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.541.000	342.052.860	365.853.478	414.720.532	345.421.970	140.345.700	328.946.099	365.459.733	354.811.696	344.878.970	74,83	96,17	99,89	85,55	99,84
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.515.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	147.026.000	342.052.860	365.853.478	414.720.532	345.421.970	140.345.700	328.946.099	365.459.733	354.811.696	344.878.970	95,46	96,17	99,89	85,55	99,84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.764.000	273.768.500	513.431.725	504.907.513	855.532.351	608.562.750	270.645.500	494.855.450	488.103.059	844.606.150	99,15	98,86	96,38	96,67	98,72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.100.000	11.697.500	12.144.525	6.153.840	10.320.798	18.547.000	11.215.000	11.712.250	6.118.320	9.327.000	97,10	95,88	96,44	99,42	90,37
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.300.000	19.728.000	30.677.950	33.740.364	36.112.650	30.082.100	18.929.000	22.249.000	24.861.864	34.433.150	96,11	95,95	72,52	73,69	95,35
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.405.000	61.442.000	79.419.750	76.465.959	91.886.353	40.005.000	61.088.500	78.298.700	71.363.475	84.906.000	94,34	99,42	98,59	93,33	92,40
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	1.200.000	1.200.000	2.080.000	1.680.000	73,33	57,14	57,14	99,05	80,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	50.700.000	8.200.000	36.800.000	41.200.000	35.860.000	50.590.000	8.200.000	32.635.000	40.622.750	35.592.000	99,78	100,0	88,68	98,60	99,25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.426.000	163.250.000	343.850.000	336.525.000	669.987.000	457.381.700	162.728.000	340.484.500	336.525.000	669.867.000	99,99	99,68	99,02	100,00	99,98
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.833.000	7.351.000	8.439.500	8.722.350	9.265.550	9.756.950	7.285.000	8.276.000	6.531.650	8.801.000	99,23	99,10	98,06	74,88	94,99

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.420.000	-	864.720.581	418.212.088	27.861.238.940	276.434.000		823.443.645	398.351.571	26.319.072.380			95,23	95,25	94,46
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	95.500.000	-				92.414.000	-	-	-	-	96,77	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.920.000	-	716.423.282	291.503.368	8.369.939.112	184.020.000	-	696.788.645	272.313.471	6.847.791.000	99,51	-	97,26	93,42	81,81
Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	19.392.512.490	-	-	-	-	19.374.375.380	-	-	-	-	99,91
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	148.297.299	126.708.720	98.787.338	-	-	126.655.000	126.038.100	96.906.000	-	-	85,41	99,47	98,10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.400.000	1.015.299.928	1.038.446.656	1.170.408.174	1.167.431.402	232.667.319	931.325.808	972.367.180	1.095.427.469	1.118.155.225	81,81	91,73	93,64	93,59	95,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.400.000	284.600.000	304.055.000	322.770.000	310.359.000	232.667.319	216.915.547	256.334.358	305.311.744	281.486.505	81,81	76,22	84,31	94,59	90,70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	730.699.928	734.391.656	847.638.174	857.072.402	-	714.410.261	716.032.822	790.115.725	836.668.720	-	97,77	97,50	93,21	97,62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.975.000	841.150.740	894.349.990	938.995.536	890.382.350	839.920.205	797.601.710	872.860.502	909.185.632	860.556.590	96,66	94,82	97,60	96,83	96,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.400.000	64.450.000	106.850.000	105.830.000	105.830.000	31.624.600	62.055.200	105.213.300	102.068.400	90.446.976	71,23	96,28	98,47	96,45	85,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.825.000	117.950.000	133.450.000	130.200.000	130.200.000	152.230.605	89.676.480	128.862.763	127.193.984	123.550.364	97,69	76,03	96,56	97,69	94,89
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.750.000	207.210.000	72.850.000	96.041.426	82.750.000	76.550.000	204.025.000	71.160.000	78.415.000	81.300.000	95,99	98,46	97,68	81,65	98,25

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	459.975.000	118.250.000	331.850.000	289.265.960	199.447.850	453.126.000	115.725.000	329.220.000	287.339.450	198.486.000	98,51	97,86	99,21	99,33	99,52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.375.000	325.790.740	183.090.740	170.847.000	176.600.000	49.439.000	318.870.030	174.140.739	168.558.626	172.221.250	98,14	97,88	95,11	98,66	97,52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.650.000	7.500.000	66.259.250	146.811.150	195.554.500	76.950.000	7.250.000	64.263.700	145.610.172	194.552.000	97,84	96,67	96,99	99,18	99,49
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	18.203.100	297.402.818	-	-	-	18.028.100	287.554.455	-	-	-	99,04	96,69	-	-
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	18.203.100	297.402.818	-	-	-	18.028.100	287.554.455	-	-	-	99,04	96,69	-	-
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	-	18.203.100	297.402.818	-	-	-	18.028.100	287.554.455	-	-	-	99,04	96,69	-	-
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	688.335.000	1.076.273.598	5.741.370.953	9.918.086.402	3.181.746.414	666.684.600	1.066.567.222	5.332.941.278	9.782.540.888	3.080.267.124	96,85	99,10	92,89	98,63	96,81
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	705.072.830	5.247.873.100	9.306.627.273	2.553.347.074	-	699.092.350	4.848.123.171	9.205.493.030	2.483.060.340	-	99,15	92,38	98,91	97,25
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	699.072.830	4.961.523.309	8.953.059.427	2.200.463.087	-	693.092.350	4.566.044.976	8.857.542.880	2.137.194.940	-	99,14	92,03	98,93	97,12
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	-	6.000.000	286.349.791	353.567.846	352.883.987	-	6.000.000	282.078.195	347.950.150	345.865.400	-	100,00	98,51	98,41	98,01
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	120.336.600	210.815.228	286.111.985	259.565.424	-	118.451.600	208.577.868	273.980.608	246.600.784	-	98,43	98,94	95,76	95,01
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	120.336.600	210.815.228	286.111.985	259.565.424	-	118.451.600	208.577.868	273.980.608	246.600.784	-	98,43	98,94	95,76	95,01

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	250.864.168	158.096.530	239.230.925	210.760.808	-	249.023.272	154.726.590	229.561.200	205.305.000		99,27	97,87	95,96	97,41
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	-	250.864.168	158.096.530	239.230.925	210.760.808	-	249.023.272	154.726.590	229.561.200	205.305.000		99,27	97,87	95,96	97,41
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	124.586.095	86.116.219	158.073.108	-	-	121.513.649	73.506.050	145.301.000			97,53	85,36	91,92
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	124.586.095	86.116.219	158.073.108	-	-	121.513.649	73.506.050	145.301.000			97,53	85,36	91,92
Peningkatan Kualitas Assesor	158.626.000	-	-	-	-	157.731.000	-	-	-	-	99,44	-	-	-	-
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi P.2 Kabupaten Bogor	220.889.000	-	-	-	-	218.744.000	-	-	-	-	99,03	-	-	-	-
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	208.292.000	-	-	-	-	193.791.600	-	-	-	-	93,04	-	-	-	-
Peningkatan Produktivitas Perusahaan	2.720.000	-	-	-	-	2.720.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Pengelolaan Pemagangan Pencari Kerja	97.808.000	-	-	-	-	93.698.000	-	-	-	-	95,80	-	-	-	-
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.232.339.000	686.627.358	2.566.247.966	4.128.984.260	1.367.528.380	1.171.730.550	672.046.762	2.377.819.502,00	3.808.372.945	1.329.331.156	95,08	97,88	92,66	92,24	97,21
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	198.474.986	946.381.780	3.588.336.152	830.525.564	-	187.580.276	906.125.971	3.276.580.833	802.857.768		94,51	95,75	91,31	96,67
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	-	-	199.850.315	201.767.481	109.985.901	-	-	196.626.370	195.788.575	108.038.500			98,39	97,04	98,23
Perluasan Kesempatan Kerja	-	198.474.986	746.531.465	3.386.568.671	720.539.663	-	187.580.276	709.499.601	3.080.792.258	694.819.268		94,51	95,04	90,97	96,43
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	55.878.050	49.549.315	56.475.050	51.198.640	-	55.293.050	48.436.650	55.094.200	50.995.811	-	98,95	97,75	97,55	99,60
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	-	55.878.050	49.549.315	56.475.050	51.198.640	-	55.293.050	48.436.650	55.094.200	50.995.811	-	98,95	97,75	97,55	99,60
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	432.274.322	1.570.316.871	352.930.698	421.881.025	-	429.173.436	1.423.256.881	348.721.069	412.636.852	-	99,28	90,64	98,81	97,81

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	225.794.800	157.838.315	104.872.718	118.408.647	-	224.194.800	154.650.400	102.352.843	117.114.900	-	99,29	97,98	97,60	98,91
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	206.479.522	1.412.478.556	248.057.980	134.536.720	-	204.978.636	1.268.606.481	246.368.226	132.791.052	-	99,27	89,81	99,32	98,70
Job Fair/Bursa Kerja	-	-	-	-	168.935.658	-	-	-	-	162.730.900	-	-	-	-	96,33
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	81.032.653	63.923.151	-	-	-	80.023.353	62.840.725	-	-	-	98,75	98,31
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	-	81.032.653	63.923.151	-	-	-	80.023.353	62.840.725	-	-	-	98,75	98,31
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	50.209.707	0	-	-	-	47.953.490	0	-	-	-	95,51	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	50.209.707	-	-	-	-	47.953.490	-	-	-	-	95,51	-
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	727.887.000	1.165.678.830	985.508.791	1.417.459.945	1.789.030.110	576.532.700	1.161.416.146	946.270.676	1.385.928.470	1.776.686.395	79,21	99,63	96,02	97,78	99,31
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	115.477.902	243.414.554	277.475.693	304.576.534	-	115.362.800	216.189.243	254.708.158	300.739.259	-	99,90	88,82	91,79	98,74
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	-	57.448.952	97.421.409	108.425.254	120.687.950	-	57.333.850	86.461.348	105.638.858	118.989.850	-	99,80	88,75	97,43	98,59
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	-	58.028.950	145.993.145	169.050.439	183.888.584	-	58.028.950	129.727.895	149.069.300	181.749.409	-	100,00	88,86	88,18	98,84
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.050.200.928	742.094.237	1.139.984.252	1.484.453.576	-	1.046.053.346	730.081.433	1.131.220.312	1.475.947.136	-	99,61	98,38	99,23	99,43

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	748.147.000	171.417.652	67.643.450	161.187.025	-	747.212.000	170.150.780	67.021.960	159.065.000	-	99,88	99,26	99,08	98,68
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	103.658.292	162.834.216	356.673.701	281.647.683	-	102.713.123	162.289.216	354.360.061	278.947.068	-	99,09	99,67	99,35	99,04
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	-	93.457.086	210.626.561	462.885.796	741.236.218	-	92.369.673	208.300.561	460.436.896	739.495.318	-	98,84	98,90	99,47	99,77
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	-	104.938.550	197.215.808	252.781.305	300.382.650	-	103.758.550	189.340.876	249.401.395	298.439.750	-	98,88	96,01	98,66	99,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	21.273.000	12.224.450	14.488.390	21.500.950	80.000.000	21.098.000	12.159.450	14.198.900	21.345.700	78.238.320	99,18	99,47	98,00	99,28	97,80
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.273.000	12.224.450	14.488.390	21.500.950	80.000.000	21.098.000	12.159.450	14.198.900	21.345.700	78.238.320	99,18	99,47	98,00	99,28	97,80
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuluhan Transmigrasi	-	12.224.450	14.488.390	21.500.950	80.000.000	-	12.159.450	14.198.900	21.345.700	78.238.320	-	99,47	98,00	99,28	97,80
Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Pelayanan tersebut diarahkan kepada berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung, baik sebagai pencari kerja, tenaga kerja, perusahaan, pekerja migran, maupun masyarakat umum. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur internal juga menjadi perhatian penting guna meningkatkan mutu pelayanan publik.

Tabel yang disajikan berikut memuat uraian kelompok sasaran utama beserta bentuk kegiatan yang dilaksanakan, mitra kerja yang terlibat, serta keterangan mengenai tujuan dan manfaat dari pelayanan tersebut. Melalui pemetaan ini, diharapkan terlihat dengan jelas arah dan fokus program yang dijalankan, sehingga setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan dan perannya dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, keberadaan tabel ini bukan hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai pedoman strategis dalam menyinergikan peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, hubungan industrial yang harmonis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Mitra Kerja	Keterangan
Pencari Kerja	<ul style="list-style-type: none">- Pendaftaran pencari kerja (AK1/Kartu Kuning)- Job Fair / Bursa Kerja- Bimbingan Karir & Konseling- Pelatihan kerja melalui BLK	<ul style="list-style-type: none">- Perusahaan- Bursa Kerja Khusus (BKK)- LPK/BLK- Disnakertrans Provinsi	Membantu pencari kerja memperoleh pekerjaan yang sesuai kompetensi dan minatnya.

Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatn kompetensi - Sertifikasi keahlian - Perlindungan tenaga kerja (sosialisasi hak & kewajiban) - Penempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - LPK/BLK - BNSP - BPJS Ketenagakerjaan - Asosiasi profesi 	Menjamin tenaga kerja memiliki daya saing, kompeten, dan terlindungi secara hukum.
Perusahaan/ Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan penyediaan tenaga kerja - Mediasi perselisihai industrial - Pendampingan penyusunan Peraturan Perusahaan/PKB - Pengawasan Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi Pengusaha (Apindo) - Serikat Pekerja - Kemenaker - Disnaker Provinsi 	Mendorong hubungan industrial yang harmonis serta kepatuhan perusahaan pada regulasi ketenagakerjaan.
Pekerja Migran Indonesia (PMI)	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan informasi dan penempatan kerja luar negeri resmi - Pembekalan pra penempatan (PAP) - Perlindungan & pendampingan PMI bermasalah 	<ul style="list-style-type: none"> - BP2MI - Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) - Disnaker Provinsi - Kemenlu 	Menjamin PMI berangkat secara prosedural, terlindungi, dan mendapatkan hak sesuai peraturan.
Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan - Edukasi pentingnya keselamatan & kesehatan kerja (K3) - Fasilitasi pelaporan Masalah ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - LSM - Media massa - Aparat Desa / Kecamatan 	Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban di bidang ketenagakerjaan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor hingga tahun 2024, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Permasalahan rendahnya persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi disebabkan oleh belum optimalnya pelatihan berbasis kompetensi. Kapasitas lembaga pelatihan masih terbatas, sementara minat tenaga kerja untuk mengikuti sertifikasi juga belum tinggi. Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam memperluas cakupan uji kompetensi juga masih kurang. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas tenaga kerja yang terstandar, sehingga sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

2) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja

Tingkat penempatan tenaga kerja melalui layanan antar kerja masih menghadapi tantangan serius karena rendahnya daya serap industri, terbatasnya kesempatan kerja, serta belum optimalnya sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dalam menyediakan lapangan kerja masih kurang efektif. Akibatnya, meskipun target penempatan sempat tercapai di tahun tertentu, secara umum capaian tidak konsisten dan cenderung stagnan, sehingga memerlukan penguatan strategi dalam memperluas jaringan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.

3) Fasilitasi Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran

Tingginya angka pengangguran terbuka menjadi indikator utama bahwa penciptaan lapangan kerja baru belum berjalan optimal. Keterbatasan jumlah lapangan kerja, terutama di sektor formal, membuat daya serap tenaga kerja lokal rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya fasilitasi penciptaan lapangan kerja yang dilakukan pemerintah daerah masih perlu diperkuat melalui

inovasi program kewirausahaan, pengembangan sektor padat karya serta peningkatan kerja sama dengan swasta untuk membuka peluang kerja lebih luas.

4) Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja

Permasalahan perlindungan tenaga kerja terlihat dari masih adanya pekerja dengan upah di bawah standar, lemahnya penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta terbatasnya jaminan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi ketenagakerjaan belum berjalan optimal di tingkat perusahaan maupun sektor informal. Akibatnya, hak-hak tenaga kerja belum sepenuhnya terpenuhi, dan masih terdapat kerentanan pekerja terhadap risiko kerja maupun ketidakadilan upah.

5) Identifikasi Berdasarkan Hasil Penjaringan Aspirasi oleh Perangkat Daerah

Hasil penjaringan aspirasi menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelatihan dan sertifikasi keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Namun, akses terhadap informasi lowongan kerja masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan. Kurangnya ketersediaan kerja sama yang konkret dengan dunia industri juga menghambat penyerapan tenaga kerja lokal. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan pelayanan ketenagakerjaan berbasis aspirasi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses informasi pasar kerja dan memperkuat hubungan dengan sektor swasta.

6) Identifikasi Faktor-Faktor Lainnya

Faktor eksternal yang memengaruhi permasalahan ketenagakerjaan antara lain masih tingginya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, minimnya kolaborasi lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan digital dalam mendukung akses ketenagakerjaan. Ketidakseimbangan tersebut semakin memperburuk tingkat pengangguran dan menimbulkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan transformasi layanan ketenagakerjaan berbasis teknologi serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.

Permasalahan yang masih dihadapi dari terkait IKU sampai dengan faktor-faktor lainnya sampai tahun 2024 dalam program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, adalah seperti yang diejelaskan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perumusan Permasalahan Dinas Tenaga Kerja

URAIAN	PERMASALAHAN
1). Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi : Target Renstra 2020–2023 rata-rata 0,40–0,43%, realisasi 2021–2023 cenderung stagnan pada kisaran 0,99–1,03% dan pada tahun 2023 turun ke 0,46% (rasio capaian 102,22%).	Belum optimalnya pelatihan berbasis kompetensi karena keterbatasan kapasitas lembaga pelatihan, rendahnya partisipasi tenaga kerja untuk mengikuti sertifikasi, serta keterbatasan anggaran daerah untuk memperluas cakupan sertifikasi.
2). Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja : Target Renstra 2020–2023 meningkat dari 12,38% hingga 21,98%, namun realisasi hanya mencapai 11,66% (2020), 16,69% (2021), 26,13% (2022), dan 23,86% (2023). Pada tahun 2020–2021 target tidak tercapai, meskipun 2022–2023 melampaui target.	Rendahnya daya serap industri dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, keterbatasan informasi pasar kerja yang terintegrasi, serta kurangnya sinergi lintas sektor dalam penyediaan lapangan kerja.
3). Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran (TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	Tingginya angka pengangguran terbuka, terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru, dan rendahnya daya serap industri terhadap tenaga kerja lokal
4). Perlindungan hak-hak tenaga kerja (TPB 1, 3 & 10)	Masih terdapat pekerja dengan upah di bawah standar, lemahnya penerapan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), serta terbatasnya perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal
5). Identifikasi berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi oleh Perangkat Daerah	- Aspirasi tinggi untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dari masyarakat. - Akses informasi lowongan kerja terbatas di daerah pelosok. - Kurangnya kerja sama konkret dengan dunia industri.
6). Identifikasi faktor-faktor lainnya	- Ketimpangan jumlah pencari kerja dan lapangan kerja masih tinggi. - Minimnya kolaborasi dengan sektor swasta. - Belum optimalnya layanan digital ketenagakerjaan.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kewenangan di bidang ketenagakerjaan, terdapat sejumlah isu strategis yang memengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, baik yang bersumber dari lingkup internasional, nasional, regional, provinsi, maupun lokal daerah.

Pada tingkat **internasional**, arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 mendorong mobilitas tenaga kerja lintas negara serta menuntut keterampilan berbasis teknologi. Selain itu, isu pembangunan berkelanjutan dan green jobs semakin relevan sehingga tenaga kerja daerah harus dipersiapkan untuk menghadapi kebutuhan sektor ramah lingkungan.

Dalam lingkup **regional (ASEAN dan Asia)**, keberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menimbulkan persaingan tenaga kerja lintas negara yang menuntut standar kompetensi lebih tinggi. Perubahan peta investasi industri di Asia Tenggara juga menjadi tantangan sekaligus peluang, karena daerah dituntut menyediakan tenaga kerja siap pakai yang sesuai kebutuhan investor.

Pada **tingkat nasional**, masih tingginya angka pengangguran terbuka, perlunya penguatan link and match antara dunia pendidikan dan industri, serta perlindungan pekerja migran menjadi isu penting. Pemerintah pusat juga menekankan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar sejalan dengan target pembangunan ekonomi nasional.

Di Provinsi Jawa Barat, masalah pengangguran terbuka relatif tinggi dibanding provinsi lain. Hal ini mendorong daerah untuk memperkuat program padat karya, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, serta percepatan digitalisasi layanan sesuai dengan arah kebijakan Jabar Digital Province.

Bagi **Kabupaten Bogor**, besarnya jumlah penduduk usia produktif merupakan potensi sekaligus tantangan. Di satu sisi, keberadaan kawasan industri dan pariwisata mampu menyerap banyak tenaga kerja, tetapi di sisi lain masih terdapat persoalan seperti PHK, perselisihan industrial, pekerja informal yang rentan, serta keterbatasan akses pelatihan berbasis teknologi maupun green jobs.

Dari **masukan DPRD Kabupaten Bogor**, isu strategis yang ditekankan antara lain pentingnya memperluas kesempatan kerja lokal untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas Balai

Latihan Kerja (BLK) agar sesuai kebutuhan industri, memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, serta mendorong inovasi digitalisasi pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan.

Jika dianalisis lebih jauh, potensi daerah memberikan kekuatan berupa jumlah penduduk usia produktif yang melimpah dan dukungan kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki kelemahan seperti keterbatasan fasilitas pelatihan dan jumlah pengawas ketenagakerjaan. Dari sisi peluang, perkembangan digital dan dukungan kebijakan nasional membuka jalan untuk menciptakan pekerjaan baru, namun terdapat tantangan berupa persaingan tenaga kerja, disrupsi teknologi, serta kerentanan pekerja informal dan migran. Dengan demikian, isu strategis yang dihadapi menuntut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk memperkuat kapasitas pelayanan, meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha, serta menyesuaikan program dengan dinamika pasar kerja yang terus berkembang.

Berdasarkan kondisi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Tenaga Kerja maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1). Kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2). Adanya kebijakan dan program prioritas di sektor ketenagakerjaan.
- 3). Adanya mekanisme kerja layanan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang terstandarisasi.
- 4). Tersedianya sumber daya manusia yang melaksanakan beberapa fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- 5). Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- 6). Posisi UPT BLK Kabupaten Bogor sebagai salah satu BLK

unggulan secara nasional.

- 7). Tersedianya *Bogor Career Center* sebagai pusat data, pusat informasi dan pusat layanan ketenagakerjaan
- 8). Tersedianya LSP P2 Ketenagakerjaan yang telah siap untuk melaksanakan uji kompetensi dengan 5 (lima) skema
- 9). Tersedianya anggaran sebagai penunjang kegiatan.

KELEMAHAN (W):

- 1). Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- 2). Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja baik di dinas maupun di UPT.
- 3). Masih kurangnya bangunan BLK yang bisa melayani pelatihan sebanyak 40 (empat puluh) kecamatan
- 4). Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1). Letak Kabupaten Bogor yang strategis sebagai penyangga Ibukota.
- 2). Tersedianya kawasan Cibinong Raya dan kawasan industri terpadu sesuai RTRW terbaru.
- 3). Tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Cigombong
- 4). Besarnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bogor.
- 5). Banyaknya jumlah perusahaan/industri (kecil, menengah, besar) di Kabupaten Bogor.
- 6). Banyaknya jumlah organisasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor.
- 7). Banyaknya jumlah lembaga pelatihan kerja swasta di Kabupaten Bogor.
- 8). Kebijakan nasional dan provinsi yang inovatif tentang pembangunan sektor ketenagakerjaan.

ANCAMAN (T):

- 1). Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor.
- 2). Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Bogor yang sesuai dengan standar perusahaan/industri.
- 3). Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi.
- 4). Minat masyarakat untuk transmigrasi masih rendah.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Strategi S-O

- 1). Pembinaan kepada organisasi ketenagakerjaan
- 2). Pelatihan SDM (PNS) di bidang ketenagakerjaan
- 3). Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
- 4). Melaksanakan transmigrasi
- 5). Meningkatkan retribusi ketenagakerjaan

2. Strategi W-O

- 1). Pembinaan lembaga pelatihan swasta
- 2). Pengembangan *Bogor Career Center* dan LSP P2 Ketenagakerjaan
- 3). Meningkatkan sarana dan prasarana
- 4). Pembangunan UPT BLK di beberapa wilayah
- 5). Optimalisasi penggunaan anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat

3. Strategi S-T

- 1). Menurunkan jumlah fakir miskin di bawah angka Propinsi Jawa Barat
- 2). Menurunkan jumlah pengangguran terbuka
- 3). Meningkatkan keterampilan pencari kerja
- 4). Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal
- 5). Peningkatan keselamatan pencari kerja.
- 6). Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis
- 7). Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga

ketenagakerjaan.

8). Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja

9). Pembinaan organisasi pekerja

4. **Strategi W-T**

1). Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan

2). Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja.

3). Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja

4). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan tenaga kerja.

Dapat di uraikan analisa dari penjelasan diatas bahwa Dinas Tenaga Kerja memiliki tantangan yang harus di hadapi :

1. Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi;
2. Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja, baik di Dinas Tenaga Kerja maupun di UPT BLK; dan
3. Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut masih di mungkinkan langkah-langkah yang akan di ambil agar organisasi tetap berjalan secara optimal, dengan memanfaatkan beberapa peluang yang akan di laksanakan yaitu:

1. Pembinaan lembaga pelatihan swasta
2. Pengembangan *Bogor Career Center* dan LSP P2 Ketenagekarjaan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dan Pembangunan UPT BLK di beberapa wilayah
4. Optimalisasi penggunaan anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan yang tepat sasaran, diperlukan identifikasi terhadap berbagai potensi, permasalahan, serta dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Proses perumusan isu strategis ini dilakukan dengan memperhatikan potensi unggulan daerah, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.

Analisis isu strategis ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan (KLHS) serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang berdampak pada dunia ketenagakerjaan, seperti disrupsi teknologi, bonus demografi, transformasi digital, serta mobilitas tenaga kerja antarwilayah. Melalui pendekatan ini, isu strategis yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang relevan dalam periode perencanaan Renstra. Adapun hasil identifikasi potensi, permasalahan, isu keberlanjutan, serta isu lingkungan strategis yang relevan dengan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel 2.4 Perumusan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja berikut:

Tabel 2.4 Perumusan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISNAKER	PERMASALAHAN DISNAKER	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN DISNAKER	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN DISNAKER			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jumlah penduduk usia kerja sangat besar, didominasi generasi muda produktif	Tingginya angka pengangguran terbuka, khususnya lulusan SMA/SMK	Kesenjangan akses lapangan kerja berkelanjutan	Disrupsi teknologi (AI, otomasi) menggeser jenis pekerjaan	Bonus demografi dan kebutuhan tenaga kerja terampil	Persaingan antar daerah dalam menciptakan lapangan kerja	Peningkatan kualitas SDM dan pengurangan pengangguran
Tersedia Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Bogor	Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri	Pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan	Persaingan global dalam menarik investasi dan tenaga kerja kompeten	Bonus demografi dan kebutuhan tenaga kerja terampil	Persaingan ketat antar daerah dalam menarik investasi dan tenaga kerj	Penyelarasan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri
Potensi tenaga kerja migran (TKI) yang cukup besar	Masih ada permasalahan perlindungan tenaga kerja migran	Perlindungan sosial dan ketenagakerjaan	Perlindungan hak pekerja migran sesuai konvensi ILO	Regulasi nasional terkait penempatan dan perlindungan PMI	Persaingan antar daerah dalam pengiriman tenaga kerja migran	Peningkatan perlindungan dan layanan ketenagakerjaan
Potensi BLK dan lembaga pelatihan kerja swasta	Kapasitas dan kualitas pelatihan belum optimal	Pengembangan SDM berkelanjutan	Transformasi digital dunia kerja & tuntutan kompetensi baru	Transformasi digital dunia kerja & tuntutan kompetensi baru	Transformasi digital dunia kerja & tuntutan kompetensi baru	Peningkatan kapasitas BLK dan pelatihan vokasi adaptif teknologi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2025-2030.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

Tujuan Dinas Tenaga Kerja mengacu pada sasaran kepala daerah. Tujuan merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Untuk mencapai tujuan, diperlukan alat ukur/indikator yang dapat memperlihatkan ketercapaian tujuan selama lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Bogor dan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah (PD). Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai dengan tupoksi setiap PD.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor menetapkan tujuan di tahun 2025 dengan menyesuaikan kondisi pembangunan prioritas dan adanya mengacu pada sasaran Kepala Daerah.

Visi Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 :

Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang

Misi Kabupaten Bogor :

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
- 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Untuk tercapainya misi di atas, maka ditetapkan Tujuan Kepala Daerah tahun 2025-2029 tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
- 5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat**

Untuk tercapainya tujuan di atas, maka ditetapkan Sasaran Kepala Daerah tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi
2. Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah
5. Meningkatnya ketahanan bencana
6. Meningkatnya tata Kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan
7. Meningkatnya akses layanan Pendidikan
8. Meningkatnya akses layanan Kesehatan
9. Terwujudnya Masyarakat yang Beretika dan Berbudaya
10. Menurunnya kemiskinan
- 11. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka**

Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 pasal 2 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu, keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah Kabupaten Bogor dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, yaitu pada :

- **Misi**
Misi ke lima (5) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Tujuan**
Tujuan ke lima (5) : Meningkatnya taraf hidup masyarakat
- **Sasaran**
Sasaran ke sebelas (11) : Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Dengan melihat misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja menetapkan tujuan yaitu “*Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan*” dengan indikator “*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*“. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikatornya diuraikan pada tabel 3.1

3.2 Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan impact/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD.

Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauhmana ketercapaian target.

Sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor telah merumuskan dan menetapkan sasaran dan indikatornya sebagai berikut: sasaran pertama yaitu “*Meningkatnya penyerapan tenaga kerja*” dengan indikatornya “*Persentase penyerapan tenaga kerja*”, sedangkan sasaran kedua yaitu “*Meningkatnya jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang terlaksana di Kabupaten Bogor*” dengan indikatornya “*Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti*”. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikatornya diuraikan pada tabel 3.1

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA
TAHUN 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,75	67,22	67,48	67,66	67,91	68,24	
		1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	%	92,71	92,75	92,81	92,87	92,92	92,99	
		2	Meningkatnya jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang terlaksana di Kabupaten Bogor	%	100	100	100	100	100	100	

3.3 Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan pada tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan :

Tabel 3.3
ARAH KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
		Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Penguatan program pelatihan kerja berbasis kompetensi, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja	
		Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan kualitas dan sertifikasi tenaga kerja, fasilitasi uji kompetensi, serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri (DUDI)	

Berdasarkan tabel arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, fokus utama yang ditetapkan dalam dokumen Renstra adalah penguatan program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu berdaya saing di dunia kerja, baik secara lokal maupun regional. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan pada pengembangan kewirausahaan bagi tenaga kerja yang memiliki potensi untuk mandiri, sehingga tidak hanya

bergantung pada lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja baru. Upaya ini menjadi penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Selanjutnya, arah kebijakan Renstra juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas serta sertifikasi tenaga kerja. Sertifikasi diharapkan dapat memberikan pengakuan formal atas keterampilan tenaga kerja sesuai standar kompetensi yang berlaku, sehingga lebih mudah terserap di pasar kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor juga memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi serta memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di era global.

3.4 Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Strategis adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra dengan mempertimbangkan SDM, fokus dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan). Strategi Dinas Tenaga Kerja dituangkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN PENAHPAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
TAHUN 2026-2030

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III bahwa tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor adalah “Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan” dengan sasaran “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja” dan “Meningkatkan jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat”, dari tujuan dan sasaran tersebut kemudian diuraikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050-5889 Tahun 2021.

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

- 1) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

d. Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil

- 1) Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil

e. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - 2) Perluasan Kesempatan Kerja
 - 3) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - 4) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara terintegrasi
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 1) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - 2) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - 3) Job Fair/Bursa Kerja
 - d. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - e. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - 2) Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
 - 3) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - 4) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 6) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyuluhan Transmigrasi
 - 3) Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran
 - 4) Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sebelum menguraikan isi Tabel 4.1, perlu ditegaskan bahwa tabel tersebut berisi rincian mengenai Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dalam periode Renstra. Tabel ini disusun secara sistematis untuk menunjukkan keterkaitan antara program dengan kegiatan dan sub kegiatannya, sehingga setiap langkah yang direncanakan dapat lebih terukur, terarah, serta sesuai dengan sasaran pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Tabel 4.1 menampilkan daftar program utama yang mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan yang lebih spesifik sesuai bidang tugas, serta sub kegiatan yang operasional dan langsung menyentuh masyarakat. Penyusunan ini bertujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, efisien, serta mudah dievaluasi. Dengan demikian, Tabel 4.1 menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi dinas benar-benar dapat diimplementasikan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tenaga kerja dan penyerapan lapangan kerja di Kabupaten Bogor. Secara lebih rinci, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

TABEL 4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan		Terciptanya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan berkurangnya pengangguran	Tersedianya data penempatan tenaga kerja, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja, serta terjalannya kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan kualitas dan serapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
		1). Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor formal maupun informal	Tersedianya lapangan kerja baru dan data penempatan tenaga kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja		
		2). Meningkatkan jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang terlaksana di Kabupaten Bogor	Terlaksananya pemerataan kesempatan kerja melalui program transmigrasi	Jumlah program/kegiatan transmigrasi yang diimplementasikan di daerah	Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	Jumlah dan jenis dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun		
				Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	Jumlah dan jenis dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya dokumen Laporan Tahunan	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan yg disusun		
				Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya tayangan publikasi media yang terselenggara	Jumlah tayangan publikasi media yang terselenggara		
				Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tercapainya pemabayaran gaji pegawai yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya dokumen koordinasi akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Dokumen Laporan Keuangan SKPD (Bulanan/Triwulanan/Semesteran) yang telah tersusun dan terkoordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Dokumen/Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang telah disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Dokumen pendataan dan hasil pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Dokumen/Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang telah tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Dokumen/Paket bahan logistik kantor yang tersedia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Dokumen/Paket barang cetakan dan hasil penggandaan yang tersedia	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang telah tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya mebel penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya alat kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia		
				Tersedianya petugas keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor		
				Tersedianya petugas kebersihan yang dibiayai	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai		
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan beserta pembayaran pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan beserta biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terpeliharanya/terrehabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terpeliharanya/terrehabilitasinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpeliharanya/terrehabilitasinya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya rencana tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersusunnya dokumen RTK	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
				Tersusunnya dokumen RTK Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Tersedianya lulusan bersertifikat kompetensi	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Terdokumentasikannya data produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
				Tersedianya lulusan bersertifikat pelatihan	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terdokumentasikannya rasio instruktur dengan peserta	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		
				Tersedianya instruktur bersertifikat	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		
				Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Tersedianya data peserta uji kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi		
				Terlaksananya kesepakatan/koordinasi	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
				Terlaksananya sosialisasi LSP	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi LSP		
				Tersedianya tenaga kerja tersertifikasi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi kompetensi		
				Tersedianya sarana pelatihan kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
				Tersedianya LPK terakreditasi	Persentase LPK yang terakreditasi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Tersedianya LPK berizin	Persentase LPK yang memiliki perizinan		
				Terbinanya LPK swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Bimtek LLS	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LLS		
				Tersedianya perusahaan yang menerapkan program produktivitas	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
				Terlaksananya konsultasi produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
				Terlaksananya pelatihan peningkatan produktivitas	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Peningkatan Produktivitas		
				Terdokumentasikannya data produktivitas	Data tingkat produktivitas total	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen hasil pengukuran	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Terlaksananya workshop produktivitas	Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengukuran produktivitas		
				Tersedianya data penempatan kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Tersedianya dokumen perjanjian kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyuluhan & bimbingan jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya program perluasan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	
				Terlaksananya pelatihan manajemen usaha	Jumlah peserta pelatihan manajemen pengembangan usaha		
				Tersedianya dokumen monitoring	Jumlah dokumen hasil monitoring		
				Tersedianya izin LPTKS	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengawasan LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
				Terlaksananya pembinaan LPTKS dan BKK	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan LPTKS dan BKK		
				Tersedianya lowongan kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Terlaksananya penempatan tenaga kerja online	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		
				Tersedianya BKK	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya data IPK	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
				Terlaksananya pendaftaran di Karir Hub	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
				Tersedianya pejabat pengantar kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		
				Terlaksananya job fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	
				Terdatanya CPMI/PMI	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pelindungan & peningkatan kompetensi PMI	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
				Tersedianya dokumen IMTA	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan di Kabupaten Bogor	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terdokumentasikannya data TKA	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang melakukan perpanjangan IMTA	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya data perusahaan penerap tata kelola	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terlaksananya pengesahan PP	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya perusahaan dengan PKB	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		
				Tersedianya struktur skala upah	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		
				Tersedianya perusahaan peserta BPJS TK	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		
				Tersedianya dokumen pengesahan PP	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				Terdokumentasikannya hasil monitoring	Jumlah Dokumen PP, PKB dan PKWT yang dimonitoring		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya sosialisasi PP	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perusahaan		
				Terdokumentasikannya data sarana HI	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Tersusunnya rekomendasi UMK/UMSK	Jumlah rekomendasi besaran UMK/UMSK Kabupaten Bogor kepada Bupati untuk di ajukan penetapannya oleh Gubernur Jawa Barat		
				Tersedianya data perselisihan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terdokumentasikannya data SP/SB	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		
					Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		
				Terlaksananya pencegahan perselisihan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya kegiatan Hari Buruh Nasional	Jumlah pelaksanaan Hari Buruh Nasional		
				Terselesaikannya perselisihan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terverifikasinya organisasi pekerja/pengusaha	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
				Terdokumentasikannya dokumen verifikasi	Jumlah dokumen verifikasi data SP/SB dan DPC di Kabupaten Bogor		
				Terpilihnya pekerja teladan	Jumlah Pekerja Teladan Terpilih		
				Tersalurkannya hibah untuk DPC	Jumlah DPC yang mendapatkan dana hibah		
				Terbinanya LKS Tripartit	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya edukasi LKS Bipartit	Jumlah peserta yang mengikuti Edukasi LKS Bipartit		
				Tersusunnya rekomendasi Tripartit	Jumlah rekomendasi Kerja Sama Tripartit Daerah yang tersusun		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Terfasilitasinya transmigran yang ditempatkan	Jumlah peserta transmigrasi yang ditempatkan	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpindahkannya transmigran	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyuluhan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Penyuluhan Transmigrasi	
				Terjajakinya calon lokasi transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	
				Terlaksananya monitoring transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	

Sebelum memaparkan Tabel 4.2 Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, perlu dijelaskan bahwa tabel ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya terkait pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Tabel ini menyajikan rincian kebutuhan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis di bidang ketenagakerjaan selama periode 2025–2030. Dengan adanya perencanaan pendanaan yang jelas, setiap langkah kebijakan dapat lebih terarah dan memiliki kepastian dukungan sumber daya.

Selain memuat rincian pendanaan, tabel ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan pengukuran, serta target tahunan yang dicapai melalui dukungan anggaran. Keterpaduan antara target dan pagu anggaran menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan telah disesuaikan dengan sasaran pembangunan ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan kerja, hingga penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, aspek pendanaan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan kinerja organisasi.

Lebih jauh Tabel 4.2 memperlihatkan kesinambungan antara kebutuhan pendanaan dan target capaian yang direncanakan secara tahunan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan ketenagakerjaan hingga akhir periode Renstra 2025–2030. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
TAHUN 2025-2030

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	39.820.037.528	BB	18.572.082.378	BB	16.430.064.354	BB	35.540.298.284	BB	17.433.729.122	A	18.514.875.851	A	24.839.430.159	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100,00	345.299.968	100	431.858.652	100	439.136.800	100	490.417.566	100	478.338.440	100	500.905.364	100	529.200.630	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	16.738.000	3	33.824.875	3	37.823.500	3	43.714.675	3	34.900.408	3	36.395.429	3	38.215.200	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	12.581.000	1	13.030.575	1	15.519.700	1	16.295.685	1	17.110.469	1	17.965.993	1	18.864.292	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.916.000	1	11.710.575	1	14.133.700	1	17.207.771	1	13.568.159	1	13.996.567	1	14.496.395	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	43.457.000	1	46.148.075	1	44.030.900	1	58.756.515	1	50.194.340	1	53.804.057	1	57.594.260	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	16.015.000	1	19.175.575	1	16.381.900	1	22.775.065	1	19.813.818	1	19.954.509	1	21.202.234	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	11.658.300	1	25.424.750	1	25.096.000	1	29.924.870	1	26.421.113	1	27.042.169	1	30.794.277	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	233.934.668	1	268.146.402	1	270.356.300	1	283.874.115	1	298.067.820	1	312.971.211	1	328.619.772	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen			1	14.397.825	1	15.794.800	1	17.868.870	1	18.262.313	1	18.775.429	1	19.414.200	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan PD	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	95,96	9.980.751.245	96,00	11.063.007.897	96,05	11.612.922.216	96,10	12.189.885.528	96,15	12.795.586.520	96,20	13.431.458.761	96,24	14.099.007.404	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	48	9.848.663.737	48	10.833.329.829	48	11.374.963.100	48	11.943.711.255	48	12.540.896.817	48	13.167.941.658	48	13.826.338.741	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	113.444.508	3	121.403.618	3	114.250.516	3	117.678.031	3	121.208.371	3	124.844.622	3	128.589.960	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen			1	21.952.250	1	20.065.300	1	21.068.565	1	22.121.993	1	23.228.092	1	24.389.496	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	9.705.000	1	11.305.050	1	12.809.400	1	13.449.870	1	14.122.364	1	14.828.481	1	15.569.905	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			1	9.477.050	1	10.086.800	1	10.591.140	1	11.120.697	1	11.676.731	1	12.260.567	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	8.938.000	1	65.540.100	1	69.889.400	1	71.986.082	1	74.145.664	1	76.370.033	1	78.661.133	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			1		1	10.857.700	1	11.400.585	1	11.970.614	1	12.569.144	1	13.197.602	
Pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100,00	6.717.000	100	7.413.500	100	7.784.200	100	8.173.410	100	8.582.080	100	9.011.184	100	9.461.743	
Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.717.000	1	7.413.500	1	7.784.200	1	8.173.410	1	8.582.080	1	9.011.184	1	9.461.743	
Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100,00	344.878.970	100	314.129.540	100	325.129.540	100	361.166.017	100	377.997.718	100	395.664.206	100	414.207.015	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			1	11.000.000	1	11.330.000	1	11.669.900	1	12.019.997	1	12.380.596			
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	344.878.970	1	314.129.540	1	314.129.540	1	314.836.017	1	331.327.818	1	348.644.209	1	366.826.419	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	Ini ganti (
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100,00	844.606.150	100	475.528.859	100	468.552.257	100	561.979.870	100	586.578.863	100	612.407.806	100	639.528.197	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.327.000	1	15.317.334	1	16.083.300	1	16.887.465	1	17.731.838	1	18.618.430	1	19.549.352	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.433.150	1	45.629.700	1	47.911.200	1	70.306.760	1	72.822.098	1	75.463.203		78.236.363	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	84.906.000	2	74.523.250	2	80.000.000	2	84.000.000	2	88.200.000	2	92.610.000	2	97.240.500	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	1.680.000	2	2.100.000	2	2.205.000	2	2.315.250	2	2.431.012	2	2.552.563	2	2.680.191	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	35.592.000	1	31.597.500	1	35.651.400	1	37.433.970	1	39.305.669	1	41.270.952	1	43.334.500	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	669.867.000	1	296.433.000	1	276.276.857	1	290.090.700	1	304.595.235	1	319.824.997	1	335.816.246	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	8.801.000	1	9.928.075	1	10.424.500	1	10.945.725	1	11.493.011	1	12.067.662	1	12.671.045	
Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100,00	26.319.072.380	100	1.364.513.860	100	723.314.956	100	16.123.878.360	100	734.954.740	100	820.202.477	100	3.911.888.409	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			1		1	35.000.000	1	36.750.000	1	38.587.501	1	40.516.876	1	42.542.720	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	234.000.000	1	245.700.000	1	257.985.000	1	270.884.251	1	284.428.464	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit							1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	6.847.791.000	25	204.580.610	25	354.266.456	25	371.979.779	25	390.578.768	25	410.107.706	25	430.613.090	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	19.374.375.380	0	-	0		1	14.184.397.656	0		0		1	2.002.175.809	
Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	96.906.000	3	1.159.933.250	1	100.048.500	1	1.265.050.925	1	27.803.471	1	78.693.644	1	1.132.128.326	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	1.118.155.225	100	1.516.064.195	100	1.122.162.917	100	1.598.271.063	100	1.207.184.615	100	1.429.291.037	100	1.850.198.538	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan							1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	281.486.505	1	550.479.500	1	307.460.261	1	532.833.274	1	359.474.937	1	487.448.684	1	616.821.118	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	836.668.720	1	965.584.695	1	814.702.656	1	1.015.437.789	1	797.709.678	1	891.842.353	1	1.183.377.420	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Pemerintahan Daerah	%	100,00	860.556.590	100	3.399.565.875	100	1.731.061.468	100	4.206.526.470	100	1.244.506.147	100	1.315.935.015	100	3.385.938.223	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	90.446.976	5	105.830.000	5	106.121.500	5	109.305.145	5	112.584.299	5	115.961.827	5	119.440.681	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	123.550.364	26	139.500.000	26	140.931.756	26	145.159.709	26	149.514.500	26	153.999.935	26	158.619.933	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110	81.300.000	110	71.800.000	110	75.390.000	110	89.159.500	110	93.117.475	110	97.273.349	110	101.637.016	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	198.486.000	3	518.200.000	3	229.456.756	3	545.340.459	3	461.088.107	3	478.551.692	3	492.908.243	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	63	172.221.250	63	506.303.550	63	221.075.556	63	389.629.334	63	409.110.800	63	429.566.341	63	451.044.658	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	194.552.000	4	2.057.932.325	4	958.085.900	4	2.927.932.324	4	19.090.966	4	40.581.872	4	2.062.287.693	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%		-	76,92	158.432.800	76,92	206.705.908	76,92	2.019.693.690	84,62	2.221.353.874	84,62	2.232.001.752	84,62	2.779.617.860	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Dokumen	0	-	1	158.432.800	1	206.705.908	1	2.019.693.690	1	2.221.353.874	1	2.232.001.752	1	2.779.617.860	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Dokumen	0		1	158.432.800	1	206.705.908	1	1.019.693.690	1	1.221.353.874	1	1.232.001.752	1	1.779.617.860	
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang							500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	
Meningkatnya Tenaga Kerja yang kompeten	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%		3.080.267.124	1,05	4.197.621.662	1,07	7.802.286.157	1,09	3.198.803.870	1,12	3.371.232.542	1,14	3.397.841.240	1,15	6.661.807.744	
Tersedianya lulusan bersertifikat pelatihan	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100,00	2.483.060.340	100	3.798.122.128	100	7.223.452.357	100	2.637.528.380	100	2.796.393.278	100	2.818.260.012	100	6.036.247.456	
	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	1,74		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		
	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100,00		100		100		100		100		100		100		
Terlaksananya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	320	2.137.194.940	540	3.537.495.178	320	6.897.834.357	320	2.373.129.480	320	2.532.774.432	320	2.544.960.225	320	5.752.782.679	
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	1	345.865.400	1	260.626.950	1	325.618.000	1	254.398.900	1	253.618.846	1	263.299.787	1	273.464.777	
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit							1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	%	11,61	246.600.784	17,28	183.664.834	17,28	214.048.700	17,28	201.251.135	17,28	208.813.692	17,28	206.754.377	17,28	225.092.096	
	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	100,00		83,33		83,33		83,33		83,33		83,33		83,33		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	148	246.600.784	161	183.664.834	181	214.048.700	201	201.251.135	221	208.813.692	241	206.754.377	261	225.092.096	
Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%							85,14	10.000.000	85,14	10.000.000	85,14	10.000.000	85,14	10.000.000	
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan							1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Terlaksananya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	7,80	205.305.000	8,27	116.261.325	8,27	218.098.900	8,27	206.003.845	8,27	204.304.037	8,27	203.019.239	8,27	222.170.200	
Terlaksananya Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	80	205.305.000	40	116.261.325	40	218.098.900	40	206.003.845	40	204.304.037	40	203.019.239	40	222.170.200	
Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data tingkat produktivitas total	%	67,05	145.301.000	65,1	99.573.375	65,1	146.686.200	65,1	144.020.510	65,1	151.721.535	65,1	159.807.612	65,1	168.297.992	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	145.301.000	1	99.573.375	1	146.686.200	1	144.020.510	1	151.721.535	1	159.807.612	1	168.297.992	
Meningkatnya Pencari Kerja Yang Bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	%	31,70	1.329.533.985	24,33	1.130.281.430	24,58	1.941.513.785	24,86	1.745.318.741	25,18	1.805.713.221	25,67	1.751.545.852	25,96	4.869.065.058	
Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. / (Rasio Penempatan terhadap pencari kerja yang dilayani)	Perjanjian	1,00	802.857.768	1	653.967.853	1	1.403.179.903	1	1.184.068.165	1	1.216.200.117	1	1.132.357.091	1	3.018.716.862	
Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang					4	113.685.700	4	129.369.985	4	119.367.857	4	110.000.000	4	130.000.000	
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	600	108.038.500	80	117.073.650	80	225.753.500	80	237.041.175	80	248.893.233	80	261.337.895	80	604.346.707	
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang					20	100.636.200	20	105.668.010	20	100.050.582	20	105.000.000	20	110.000.000	
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	160	694.819.268	160	536.894.203	200	963.104.503	200	711.988.995	200	747.888.445	200	656.019.196	200	2.174.370.155	
Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga	1	51.198.640													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	1	51.198.640													
Tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	2.785	412.636.852	2600	415.781.602	2600	446.998.482	2600	467.348.406	2600	490.815.826	2600	515.456.618	2600	1.441.329.447	
	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	1.559		4000		4000		4000		4000		4000		4000		
	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK	0,00		125		125		125		125		125		125		
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihadirkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	117.114.900	1	123.320.300	1	121.285.182	1	127.349.441	1	133.716.913	1	140.402.759	1	447.422.896	
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	17.299	132.791.052	21000	162.377.577	21000	126.692.500	21000	133.027.125	21000	139.678.481	21000	146.662.405	21000	453.995.525	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	500	162.730.900	80	130.083.725	80	199.020.800	80	206.971.840	80	217.420.432	80	228.391.454	80	539.911.026	
Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	70,00	62.840.725	70	60.531.975	70	91.335.400	70	93.902.170	70	98.697.278	70	103.732.143	70	409.018.749	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Diindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	30	62.840.725	30	60.531.975	30	91.335.400	30	93.902.170	30	98.697.278	30	103.732.143	30	409.018.749	
Diterapkannya Tata Kelola Kerja yang Layak Bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	42,65	1.776.686.395	43,06	1.108.872.489	43,26	142.139.585	43,42	1.587.758.738	43,63	2.578.099.061	43,79	1.585.325.815	43,99	5.660.496.631	
Tersediannya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	8,65	300.739.259	7,33	312.929.609	7,33	60.916.965	7,33	377.013.071	7,33	634.766.112	7,33	386.504.416	7,33	1.166.329.635	
	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	0,67		1,69		1,69		1,69		1,69		1,69		1,69		
	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%	9,32		7,71		7,71		7,71		7,71		7,71		7,71		
	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	0,00		71,03		71,03		71,03		71,03		71,03		71,03		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	116	118.989.850	117	68.741.850	117	20.305.655	117	124.166.285	117	158.350.794	117	126.268.333	117	290.581.749	
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan			27	71.935.050	28	20.305.655	29	72.748.448	30	155.812.063	31	73.602.666	32	277.282.799	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terseleenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	181.749.409	1	172.252.709	1	20.305.655	1	180.098.338	1	320.603.255	1	186.633.417	1	598.465.087	
Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	1,61	1.475.947.136	10,65	795.942.880	10,65	81.222.620	10,65	1.210.745.667	10,65	1.943.332.949	10,65	1.198.821.399	10,65	4.494.166.996	
	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	SP/SB	361,00		345		350		355		360		365		370		
	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	LKS	1,00		1		1		1		1		1		1		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	36	159.065.000	38	176.574.000	40	20.305.655	45	179.749.044	50	288.736.496	55	181.495.124	60	561.569.880	
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	36	278.947.068	38	270.570.218	40	20.305.655	45	236.153.789	50	332.461.478	55	234.084.552	60	551.288.779	
Terseleenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	364	739.495.318	345	152.860.712	350	20.305.655	355	550.551.685	360	1.004.629.269	365	524.860.732	370	2.849.008.297	
Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	298.439.750	1	195.937.950	1	20.305.655	1	244.291.149	1	317.505.706	1	258.380.991	1	532.300.040	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
Meningkatnya Jumlah Kepala Keluarga yang diberikan penyuluhan / sosialisasi program transmigrasi	Persentase kepala keluarga yang mendapatkan penyuluhan	%	0,00	78.238.320	100,00	65.302.625	100	138.098.765	100	135.912.332	100	143.179.154	100	149.852.417	100	159.824.350	
Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta transmigrasi yang ditempatkan	KK	0,00	78.238.320	0	65.302.625	0	138.098.765	0	135.912.332	0	143.179.154	0	149.852.417	0	159.824.350	
Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	0	-	0	-	3	14.355.282	3	13.869.407	3	14.869.947	3	16.967.204	3	15.849.856	
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	150	78.238.320	140	65.302.625	140	106.388.202	140	103.173.518	140	108.439.262	140	110.918.009	140	123.124.638	
Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	-	-	-	-	2	17.355.281	2	16.869.407	2	17.869.945	2	19.967.204	2	18.849.856	
Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK							3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	
Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket							1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	

TABEL 4.3
SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Tenaga Kerja yang kompeten	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sub Kegiatan Prioritas dari Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja di BLK
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Pencari Kerja Yang Bekerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Sub Kegiatan Prioritas dari Wirausaha Baru

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berkualitas, Dinas Tenaga Kerja menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja secara terukur dari tahun ke tahun. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi. IKU yang ditetapkan menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja agar selaras dengan sasaran pembangunan daerah maupun nasional di bidang ketenagakerjaan. Adapun target kinerja utama yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,75	67,22	67,48	67,66	67,91	68,24
2	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	92,71	92,75	92,81	92,87	92,92	92,99
3	Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis pembangunan ketenagakerjaan di daerah, Dinas Tenaga Kerja menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode Rencana Strategis (Renstra). Penetapan IKK ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, serta pelayanan ketenagakerjaan yang lebih baik kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Kunci ini juga menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, sehingga capaian yang dihasilkan dapat terukur secara obyektif dari tahun ke tahun. Dengan adanya target yang jelas, terukur, dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun daerah. Adapun target Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS TENAGA KERJA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,75	67,22	67,48	67,66	67,91	68,24	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	92,71	92,75	92,81	92,87	92,92	92,99	Dinas Tenaga Kerja
3	Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketenagakerjaan	Poin	88	88,20	88,45	88,72	88,90	89,24	Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 terlihat adanya target terukur yang direncanakan untuk periode tahun 2025–2030. Indikator pertama adalah “*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*” yang mengalami tren peningkatan dari 66,75% pada tahun 2025 menjadi 68,24% pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat usia kerja agar lebih aktif berpartisipasi dalam pasar kerja melalui berbagai program pelatihan, penempatan, dan kewirausahaan. Indikator kedua adalah “*Persentase Penyerapan Tenaga Kerja*”, dengan target stabil di kisaran 92,71% pada tahun 2025 hingga mencapai 92,99% pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja agar tetap tinggi dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada indikator ketiga yaitu “*Kebijakan Transmigrasi Pemerintah Pusat yang Ditindaklanjuti*”, target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahunnya, sebagai wujud keseriusan daerah dalam mendukung kebijakan nasional. Terakhir, indikator keempat yaitu “*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan*” juga menunjukkan peningkatan bertahap dari 88 poin pada tahun 2025 menjadi 89,24 poin pada tahun 2030. Hal ini menandakan adanya dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara konsisten dan berkesinambungan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Dinas Tenaga Kerja selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan bidang urusan tenaga kerja dan transmigrasi, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Bersih No. 2, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

Telp. (021) 8757668/ 8760273

Email: disnakerbogorkab@gmail.com, Website: <https://disnaker.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 500.6.1/ 7388 -Sekret

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat administrator sesuai dengan penjenjangan kinerja.
- KEEMPAT : Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 08 Desember 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bogor



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

- Tugas Pokok Fungsi : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan tugas pembantuan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
 e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU					FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN		2025	2026	2027	2028	2029			
1	Meningkatnya pembangunan ketenagakerjaan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,75%	67,22%	67,48%	67,66%	68,24%	Jumlah Angkatan Kerja/Jumlah Penduduk Usia Kerja x 100%	Kepala Dinas	BPS
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	92,71%	92,75%	92,81%	92,87%	92,92%	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap/Jumlah Angkatan Kerja x 100%	Kepala Dinas	BPS
		Meningkatnya jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang terlaksana di Kabupaten Bogor	Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Kebijakan transmigran pemerintah pusat yang ditindaklanjuti/total kebijakan transmigrasi pemerintah pusat x100%	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Kepala Dinas Tenaga Kerja,

